

# Gerakan Pembangunan Kelautan

## (Tanggapan atas Gerbang Mina Bahari)

Thomas Nugroho

"Mewujudkan Gerbang Mina Bahari (GMB)" dimuat harian *Kompas* tanggal 30 April 2003 untuk dicermati. Pada harian tersebut, Departemen Kelautan dan Perikanan menawarkan GMB sebagai gerakan pembangunan perikanan dan kelautan. Penulis, terlalu sederhana menyebut GMB yang digagas DKP sebagai gerakan pembangunan kelautan.

MUNCULNYA gerakan GMB semakin memper-tegas bahwa tugas yang diem-pun secara riil adalah per-bangunan kelautan. Terlalu menyerahkan sepenuhnya jawab pembangunan hanya pada institusi kelautan, dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan, pembangunan kem-punya dimensi yang luas, yaitu bukan hanya mengembangkan perikanan yang selama ini diem-pun oleh DKP.

Tidak ada DKP, pembanguan kelautan sudah ber-jadwalkan. Namun, hing-ga ini pembangunan ke-lautan berjalan tanpa arah. Pembangunan kelautan selama ini oleh beberapa in-stitusi pemerintahan, antara lain Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Per-hutanan, Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Keu-angan, dan Kehidupan Masyarakat. Meskipun pembanguan kelautan selama ini berjalan dengan baik, kontribusi-nya terhadap perekonomian nasional selama ini oleh DKP mencapai se-perse.

DKP meningkatkan pembangunan per-lautan melalui gerakan perab-ah perikanan patut dipuji. Namun, patut disesalkan gerak-an pembangunan perikanan ala Gerbang Mina Bahari; meniru for-ma, dan model pembanguan Gerbang Mina Bahari. Ada catatan yang patut diwaspadakan bersama gerakan GMB ini, ya-

Pertama, gagasan GMB sangat neoliberal. Hal ini terlihat dari tujuannya yang sangat menekankan pada pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi semata. Dengan gerakan GMB, kepentingan pemilik modal untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan baik di darat maupun di perairan laut Nusantara akan terfasilitasi. Di samping itu, dikhawatirkan GMB akan menjadi pintu masuk para pemburu rente ekonomi dalam melakukan eksploitasi sumber daya perikanan.

Kedua, gagasan GMB terlalu mengikuti *mainstream* pembangunan pertanian. Sebab, latar belakang konsep GMB menurut logika konsep swasembada pangan yang pernah dikembangkan Departemen Pertanian yang notabene pada masa lalu mengalami kegagalan. Gerakan GMB akan mendorong berkembangnya pola-pola ekstensifikasi dan intensifikasi dalam memanfaatkan potensi sumber daya perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Padahal, pola-pola yang demikian akan mengancam kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan dan aktivitas pemanfaatannya.

Ketiga, GMB lebih berorientasi pada peningkatan produksi perikanan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Orientasi gerakan GMB sama sekali bukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil. Tetapi, cenderung berorientasi pada kepentingan pemilik modal yang mampu melakukan eksploitasi sumber daya perikanan skala besar.

Keempat, dalam menyusun konsep GMB tidak melalui pembahasan yang melibatkan peran publik secara luas, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Proses penyusunan GMB sangat terpusat atau bersifat *top down*, hal demikian yang menyebabkan tertutupnya peluang partisipasi publik dalam membahas program pembangunan perikanan.

Dengan konsep GMB, DKP cenderung akan mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya perikanan secara besar-besaran dengan memprioritaskan investasi skala besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Ada kesan DKP lebih memprioritaskan pengembangan perikanan skala besar ketimbang perikanan rakyat. Padahal, kondisi perikanan nasional didominasi oleh perikanan rakyat, yaitu sekitar 90 persen. Dengan konsep GMB ini dikhawatirkan, nasib perikanan rakyat semakin tidak menentu alias akan telantar kembali seperti pada masa lalu.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa gerakan GMB merupakan kebijakan yang kontrareformasi. Sebab, kebijakan tersebut sama sekali tidak mengindahkan tuntutan reformasi, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan, terutama nelayan kecil yang pada masa lalu sangat ditelantarkan. Skala usaha tradisional sangat mewarnai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil. Kondisi demikian cenderung merata di seantero Nusantara dan merupakan representasi tingkat aktivitas perikanan rakyat di Indonesia. Perikanan rakyat selama Orde Baru hingga saat ini kurang mendapat apresiasi dari pemerintah. Padahal, apabila perikanan rakyat diberdayakan, bukan tidak mungkin akan mampu menggerakkan pembangunan perikanan nasional.

Oleh karena gerakan GMB ini tidak akan memberikan faedah bagi masyarakat perikanan, maka sebaiknya program GMB ini dibatalkan saja. Lebih baik pemerintah mengembangkan program-program pembangunan perikanan yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas. Misalnya, program pembangunan perikanan yang bertujuan meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi bagi para nelayan.

Persoalan bidang penangkapan perikanan yang sampai saat ini belum juga dapat diatasi adalah pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing yang menggunakan kapal-kapal ikan dengan teknologi tinggi. Kalau ingin menyelesaikan masalah pencurian ikan jangan kemudian yang disalahkan pihak lain, seperti lemahnya pihak keamanan dalam pengawasan wilayah perairan laut.

Yang lebih penting untuk diatasi adalah meningkatkan penguasaan teknologi penangkapan ikan nelayan-nelayan Indonesia. Karena, nelayan Indonesia yang memiliki kapal ikan dengan teknologi tinggi bisa dihitungkan dengan jari. Kalau saja Indonesia mempunyai ribuan bahkan jutaan kapal ikan dengan teknologi tinggi dan tersebar di seluruh perairan Nusantara, maka masalah *illegal fishing* ini otomatis akan hilang dengan sendirinya. Sebab, dengan penguasaan teknologi tinggi para nelayan akan mampu turut mengawasi wilayah perairan laut teritorial negara Indonesia sehingga kerugian yang sering kali diderita Indonesia akibat *illegal fishing*, yang menurut catatan pemerintah mencapai sekitar 4 miliar dollar AS (Rp 28 triliun dengan kurs Rp 8000) per tahun, dapat diatasi. Tidak bisa dibayangkan sudah berapa ribu triliun rupiah negara Indonesia telah dirugikan dari *illegal fishing* ini selama masa Orde Baru.

Alternatif program yang dapat dikembangkan adalah program modernisasi nelayan, yaitu dengan memberlakukan standarisasi teknologi armada penangkapan ikan. Standarisasi ini dimaksudkan agar ada batasan kemampuan teknologi penangkapan ikan yang harus dikuasai oleh para nelayan. Tujuannya adalah agar suatu saat mayoritas nelayan Indonesia menguasai teknologi penangkapan ikan dengan armada yang modern seperti halnya para nelayan negara asing, yaitu Thailand, Taiwan, Jepang, dan Filipina. Program modernisasi nelayan juga harus didukung oleh infrastruktur perikanan yang modern.

Hal yang sama juga harus dilakukan pada perikanan budidaya. Di bidang budidaya perikanan, masalah yang dihadapi relatif sama dengan perikanan tangkap, yaitu lemahnya penguasaan IPTEK. Tidak heran bila investasi budidaya yang pernah terjadi pada masa lalu hingga saat ini dikuasai oleh pihak asing. Harus diingat bahwa investasi pihak asing yang terjadi di Indonesia selama ini motifnya hanyalah eksploitasi sumber daya alam dan manusia; tidak mengindahkan aspek keadilan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Hal demikian pernah terjadi di Lampung, yaitu investasi yang dilakukan oleh PT Dipasena Citra Dramaja dan PT Bratasena. Apa yang terjadi dari investasi tersebut adalah yang diperoleh bangsa Indonesia bukannya

manfaat, tetapi malah nestapa. Akibat ketidakeresanan manajemen bisnis, perusahaan tersebut akhirnya hancur sehingga ribuan tenaga kerja telantar dan ribuan hektar lahan budidaya menjadi usak parah.

### Pembangunan kelautan

Dengan penjelasan di atas sesungguhnya dapat dikatakan bahwa GMB bukanlah gerakan pembangunan kelautan, tetapi hanyalah gerakan pembangunan perikanan. Gerakan pembangunan perikanan merupakan bagian dari gerakan pembangunan kelautan. Indonesia sebagai negara yang dikaruniai kekayaan sumber daya laut yang sangat besar, sudah semestinya meningkatkan kapasitas pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya laut untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.